

**Pengarahan**

**KISI-KISI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2013**

**ISU STRATEGIS, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2014**

**A. Isu Strategis Tahun 2014**

Sejalan dengan isu strategis tingkat nasional maupun tingkat provinsi maka pada tahun 2014 dihadapkan pada **isu strategis** meliputi :

1. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat;
2. Peningkatan ketahanan pangan;
3. Peningkatan investasi dan usaha serta daya saing daerah;
4. Pemerataan sarana dan prasarana wilayah;
5. Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
6. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak; dan
7. Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana alam.

**B. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2014**

Strategi pembangunan yang ditetapkan adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Strategi Pembangunan	Kebijakan Pembangunan
I	<i>Isu Strategis : Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.</i>	
	1. Penurunan dan Penanganan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	<p><b>Kemiskinan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pendapatan yang disertai distribusi pendapatan yang berkeadilan dan merata di masyarakat;</li> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan rumah tidak layak huni;</li> <li>• Peningkatan akses terhadap permodalan bagi masyarakat miskin;</li> <li>• Peningkatan perlindungan aset penghidupan sumber mata pencaharian;</li> <li>• Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat miskin pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas koordinasi penanganan kemiskinan;</li> </ul> <p><b>Pengangguran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesempatan kerja dengan mendorong tumbuhnya investasi masyarakat melalui akses kesempatan berusaha, informasi permodalan dan sumber daya pendukung;</li> <li>• Peningkatan peran IKM, UKM, koperasi dan industri rumah tangga dalam rangka penyerapan tenaga kerja;</li> <li>• Pembinaan, penataan dan pengembangan sektor informal dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan pembukaan kesempatan kerja;</li> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan bursa kerja;</li> </ul> <p><b>Kualitas Hidup</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha dalam pemberdayaan PMKS;</li> <li>• Perluasan manajemen, jangkauan, dan pemerataan pelayanan kesejahteraan sosial.</li> </ul>
	2. Peningkatan kualitas sumberdaya	• Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan

	<p>manusia dalam rangka peningkatan produktivitas guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.</p>	<p>aksesibilitas terhadap layanan kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas layanan pendidikan dan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan.</li> <li>• Peningkatan keterampilan, terutama kepada para pelaku usaha kecil, menengah, koperasi serta rumah tangga, disertai dengan peningkatan penggunaan teknologi tepat guna;</li> </ul>
II	<i>Isu Strategis : Peningkatan ketahanan pangan.</i>	
	<p>1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan serta diversifikasi bahan dan produk pangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran kelembagaan tani;</li> <li>• Peningkatan dan mempertahankan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga;</li> <li>• Peningkatan inovasi dan alih teknologi pertanian berbasis lokal;</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pertanian;</li> <li>• Peningkatan ketersediaan pangan;</li> <li>• Peningkatan distribusi pangan;</li> <li>• Peningkatan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri melalui revitalisasi pertanian;</li> <li>• Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan;</li> <li>• Peningkatan produksi dan kontinuitas produksi pertanian.</li> </ul>
	<p>2. Peningkatan tata kelola lahan pertanian beserta alih fungsinya termasuk dalam penetapan lahan pertanian berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kepatuhan atas komitmen penetapan lahan pertanian berkelanjutan;</li> <li>• Peningkatan kesadaran, ketaatan dan peran masyarakat dalam penegakan hukum tentang tata ruang dan wilayah (alih fungsi lahan, dsb).</li> </ul>
III	<i>Isu Strategis : Peningkatan investasi dan usaha serta daya saing daerah.</i>	
	<p>1. Peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan peran IKM, UKM, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia dan pengembangan kewirausahaan;</li> <li>• Peningkatan peran UKM, IKM, koperasi dan lembaga keuangan mikro melalui pengembangan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta sarana dan prasarana;</li> </ul>
	<p>2. Peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mendorong tumbuhnya investasi dan usaha ekonomi kreatif yang didukung dengan peningkatan promosi potensi ekonomi daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan iklim investasi dan usaha serta akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil;</li> <li>• Peningkatan promosi potensi ekonomi daerah baik ke luar daerah maupun di dalam daerah;</li> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur organisasi pemerintah daerah yang menangani urusan penanaman modal;</li> </ul>
	<p>3. Pembangunan kawasan ekonomi khusus dan cepat tumbuh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta peningkatan sarana dan prasarana;</li> <li>• Pengembangan kawasan agrowisata;</li> <li>• Pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor, berbasis klaster dan memiliki daya saing;</li> <li>• Peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi non budidaya di pedesaan.</li> </ul>
IV	<i>Isu Strategis : Pemerataan sarana dan prasarana wilayah.</i>	
	<p>1. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dalam rangka penguatan konektivitas domestik (jalur penyambung antar</li> </ul>

	wilayah.	<p>daerah);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada;</li> <li>• Peningkatan perluasan pelayanan infrastruktur perkotaan seiring dengan penambahan jumlah kelurahan;</li> </ul>
V	<i>Isu Strategis : Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.</i>	
	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tata kelola pemerintahan, melalui penataan organisasi dan aparatur;</li> <li>• Peningkatan kualitas, efektifitas, dan pemberdayaan aparatur daerah;</li> <li>• Penguatan dan efektifitas organisasi pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi (E-Govt);</li> </ul>
	2. Peningkatan pelayanan prima dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan sinergitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah;</li> <li>• Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) semua urusan yang telah memiliki SPM.</li> </ul>
VI	<i>Isu Strategis : Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.</i>	
	1. Peningkatan pengarusutamaan gender.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM perempuan, terutama di pedesaan;</li> <li>• Peningkatan peran perempuan dan organisasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;</li> <li>• Peningkatan perlindungan terhadap perempuan;</li> <li>• Peningkatan akses perempuan terhadap hasil pembangunan.</li> </ul>
	2. Peningkatan perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan terhadap anak;</li> <li>• Pengembangan ruang bermain dan ruang kreasi anak yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak;</li> </ul>
VII	<i>Isu Strategis : Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana alam.</i>	
	1. Pembangunan yang berkelanjutan dengan peningkatan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan (Go Green).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemanfaatan SDA dalam pembangunan yang disertai upaya penjagaan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup dan SDA;</li> </ul>
	2. Pengendalian tata ruang melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang, pertanahan dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;</li> <li>• Peningkatan kesadaran, ketaatan, dan peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup;</li> <li>• Peningkatan kesadaran, ketaatan, dan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;</li> </ul>
	3. Penanganan kerusakan lingkungan hidup dan penanganan bencana alam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan dan peningkatan kondisi lingkungan hidup yang memburuk (lahan kritis);</li> <li>• Pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup;</li> <li>• Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan bencana alam;</li> </ul>

### C. Pokok-pokok Program Pembangunan Daerah

Pokok-pokok program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penanganan masalah kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan;
4. Peningkatan ketahanan pangan;
5. Peningkatan kualitas, kuantitas dan produktivitas pertanian melalui sistem agribisnis, agroindustri
6. Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan atau kawasan cepat tumbuh, khususnya kawasan agrowisata;
7. Peningkatan iklim investasi dan usaha;
8. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan yang mandiri berbasis bahan baku lokal;
9. Percepatan pembangunan, peningkatan dan pemerataan insfrastruktur dalam rangka penguatan konektivitas domestik (jalur penyambung antar daerah);
10. Peningkatan pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).
11. Peningkatan pengarusutamaan gender dan peningkatan perlindungan anak;
12. Peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana alam.

### D. Kriteria Kegiatan Pembangunan Daerah

Usulan kegiatan di Tahun 2014 untuk berpedoman pada program-program tersebut diatas. Usulan kegiatan yang akan mendapatkan prioritas adalah kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Menunjang Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dan Kebijakan/Program Pemerintah Pusat (misal: MDG's, KLA, PNPM, PKH, Pansimas, dll);
3. Menunjang kegiatan dalam rangka membangun kawasan ekonomi khusus dan atau cepat tumbuh;
4. Menunjang pengembangan dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi (*E-Govt*);
5. Menunjang peningkatan kualitas (SDA dan SDM) dan insfrastruktur pendukungnya; dan
6. Merupakan lanjutan program/kegiatan dari tahun sebelumnya.

### E. Catatan Khusus Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar usulan kegiatan yang tidak lolos menjadi prioritas usulan di Musrenbang RKPD Kabupaten untuk dituangkan dalam Berita Acara tersendiri;
2. Alokasi Anggaran untuk Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) tidak diperkenankan kembali untuk dibagi rata pada kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk didanai dengan Program PWK;

Temanggung, Pebruari 2013

Tim Assitensi/Monitoring  
Musrenbang RKPD Kabupaten  
Di Kecamatan